



**Laporan Kinerja Triwulan 1
BPMP Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Sumatera Utara selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen				
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Progress/Kegiatan

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen [IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, Target capaian output adalah 22.766 lembaga, dan sampai akhir Maret 2025 yang sudah terfasilitasi adalah 9.865 lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan triwulan I Tahun 2025 adalah mayoritas kegiatan daring berupa webinar karena pagu anggaran masih terblokir.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Telah dilaksanakan rapat awal penyusunan program kerja terkait IKK 1.1
2. Kegiatan Sosialisasi Program Wajib Belajar 13 Tahun Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Bermutu
3. kegiatan Webinar Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

1. dalam pelaksanaan rapat awal penyusunan program terkait IKK 1.1, penyusunan program terkendala pagu anggaran masih terblokir.
2. Dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Wajib Belajar 13 Tahun Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Bermutu, kendala yang dihadapi Adalah Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dari usia dini hingga jenjang menengah dan Tidak berjalannya rencana tindak lanjut akibat keterbatasan anggaran atau rendahnya partisipasi daerah serta adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan
3. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan webinar Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, antara lain 1. Partisipasi peserta rendah (tidak hadir, keluar sebelum selesai); 2. Materi terlalu teoritis, tidak aplikatif di satuan pendidikan; 3. Kendala dalam komunikasi atau manajemen waktu saat webinar (misal: diskusi molor, moderator pasif).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Kendala masih terblokirnya pagu anggaran akan disiasati dengan pelaksanaan kegiatan secara online.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Wajib Belajar 13 Tahun Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Bermutu, akan atasi dengan cara melakukan advokasi berkelanjutan kepada pemangku kebijakan.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Progress/Kegiatan

Capaian kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen [IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan, Target capaian output adalah 22.766 lembaga, dan sampai akhir Maret 2025 yang sudah terfasilitasi adalah 9865 lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan triwulan I Tahun 2025 adalah kegiatan daring berupa webinar karena pagu anggaran masih terblokir.

1. Telah dilaksanakan rapat awal penyusunan program kerja terkait IKK 1.2
2. Kegiatan Webinar Advokasi Penjaminan Mutu Kinerja Satuan Pendidikan Seri 1

Kendala/Permasalahan

1. Dalam pelaksanaan rapat awal penyusunan program terkait IKK 1.2, penyusunan program terkendala pagu anggaran masih terblokir.
2. Kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Webinar Advokasi Penjaminan Mutu Kinerja Satuan Pendidikan Seri 1, antara lain 1. Partisipasi peserta rendah (tidak hadir, keluar sebelum selesai); 2. Materi terlalu teoritis, tidak aplikatif di satuan pendidikan; 3. Kendala dalam komunikasi atau manajemen waktu saat webinar (misal: diskusi molor, moderator pasif).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Kendala masih terblokirnya pagu anggaran akan disiasati dengan pelaksanaan kegiatan secara online, dan meningkatkan komunikasi melalui whatsapp grup wali wilayah dimasing-masing kabupaten/kota.
2. Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Webinar Advokasi Penjaminan Mutu Kinerja Satuan Pendidikan Seri 1, yaitu menarik perhatian peserta dengan memberikan gift/hadiah kuis tiap akhir sesi materi.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik

Progress/Kegiatan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Provinsi Sumatera Utara Bulan Maret Tahun 2025 yaitu 100 Nilai EKA = 100 sehingga nilai NKA = $50\% (100) + 50\% (100) = 100$. pada triwulan 1 tahun 2025 7 indikator penilai IKPA BPMP Provinsi Sumatera Utara semua bernilai 100.

Kendala/Permasalahan

Masih terblokirnya pagu anggaran sehingga terkendala pencairan anggaran, pencairan anggaran yang bisa dilakukan hanya berupa pembayaran gaji pegawai dan belanja operasional perkantoran.

Strategi/Tindak Lanjut

Terkait masih terblokirnya anggaran tidak lanjut dengan terus berkomunikasi dengan eselon 1 terkait kapan waktu buka blokir anggaran.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A

Progress/Kegiatan

Nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 yaitu 82,5 dan mendapatkan predikat A atau memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 dan kelompok kerja. Untuk meningkatkan capaian kinerja [SK 2.0] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara [IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A, Pada triwulan I Tahun 2025 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Program kerja pada awal tahun 2025
2. Penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2024 telah disusun dengan baik dan terselesaikan tepat waktu pada bulan Januari 2025
3. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi SAKIP Tahun 2024
4. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 1 dan 2
5. Telah dilaksanakan evaluasi program kerja mingguan setiap hari senin.
6. Rapat Pembangunan Tim ZI WBK
7. Dalam hal pengembangan kapasitas SDM telah dilaksanakan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Widyapra Indonesia.

Kendala/Permasalahan

1. Pagu anggaran yang masih terblokir sehingga rapat penyusunan program belum dapat menghasilkan jadwal pelaksanaan yang jelas, karena masih menunggu jadwal tetap dari eselon 1.
2. Kendala dalam pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Widyapra Indonesia, antara lain 1. Peserta yang hadir tidak tepat waktu; 2. Peserta tidak mengikuti kegiatan hingga selesai
3. Belum sepenuhnya Widyapra memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Terkait masih terblokirnya anggaran ditidak lanjuti dengan terus berkomunikasi dengan eselon 1 terkait kapan waktu buka blokir anggaran.
2. Kendala dalam permasalahan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Widyapra Indonesia dapat diatasi dengan Melakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM dalam PMP

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7605.QDB.750] Satuan PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	0	9865	Rp12.507.722.000	Rp5.778.857.815	46.20
2	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
3	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp340.000.000	Rp0	0.00
4	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp26.591.564.000	Rp17.656.516.331	66.40
Total Anggaran					Rp39.449.286.000	Rp23.435.374.146	59.41

D. Rekomendasi Pimpinan

1. terkait anggaran yang masih terblokir, agar terus berkoordinasi dengan biro perencanaan dan penganggaran
2. SKP segera disusun berdasarkan draf PK yang telah disusun
3. karena anggaran program kegiatan masih terblokir, agar kegiatan-kegiatan prioritas segera dilaksanakan dengan metode daring

Medan, 29 Agustus 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala
	Tajuddin Indris, S.Si., M.T



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE